

# DAYA SAING DAN PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITI KAKAO DI SULAWESI TENGAH

## *Competitiveness and the Role of Government to Increase Competitiveness of Cocoa in Central Sulawesi*

Siti Yuliaty Chansa Arfah<sup>1</sup>, Harianto<sup>2</sup>, Suharno<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Agribisnis, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia

email: ulliechansa@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji daya saing komoditi kakao di Sulawesi Tengah dan melihat peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing komoditi kakao. Data primer berasal dari observasi, wawancara dan kuesioner, sementara data sekunder berasal dari instansi terkait. Metode analisis menggunakan *Policy Analysis Matrix* (PAM) dan analisis sensitivitas. Penelitian ini menemukan bahwa nilai PCR Kabupaten Parigi Moutong 0,589 dan Kabupaten Sigi 0,396. Sedangkan nilai DRC Kabupaten Parigi Moutong 0,387 dan Kabupaten Sigi 0,319. Hal tersebut mengindikasikan bahwa usahatani komoditi kakao di Sulawesi Tengah memiliki daya saing, namun tidak menguntungkan secara ekonomi karena Sulawesi Tengah menghasilkan biji kakao yang tidak difermentasi akibatnya petani menerima harga rendah. Berdasarkan hasil analisis, pemerintah belum memberikan proteksi terhadap harga biji kakao dalam negeri melalui harga referensi biji kakao sehingga harga biji kakao didaerah penelitian masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan harga di pasar internasional. Sementara terhadap input, pemerintah telah memberikan kebijakan subsidi kepada petani, namun implementasinya masih perlu perbaikan terutama terkait penyaluran dan pengelolaan bantuan agar merata. Kajian ini merekomendasikan masih diperlukan kebijakan pemerintah baik terhadap input maupun output untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi dan menaikkan harga jual biji kakao, sehingga dapat meningkatkan daya saing biji kakao.

**Kata Kunci:** Daya Saing, Biji Kakao, *Policy Analysis Matrix*

### Abstract

The purpose of this study is to assess the competitiveness of cocoa in Central Sulawesi and to investigate the role of government in improving the competitiveness of cocoa. The primary data were generated through observation, interviews and some questionnaires. The secondary data were obtained from the agency or the institution related to the research. This study uses the *Policy Analysis Matrix* (PAM) and sensitivity analysis. The study found that the PCR value for Parigi Moutong district was 0.589 and Sigi district was 0.396. While, the DRC value for Parigi Moutong district was 0.387 and Sigi district was 0.319. This indicates that cocoa beans farming in Central Sulawesi has competitiveness, but not economically beneficial because Central Sulawesi produces unfermented cocoa beans consequently farmers receive low prices. Based on the results of the government's impact on output analysis, the government did not provide protection for domestic cocoa seed prices through the reference price of cocoa beans, consequently the price of domestic cocoa beans, particularly in the research area, was relatively low compared to the price of cocoa beans at the international market. Seen from the government policy on inputs, the government have provided subsidies to farmers but they need to improve the distribution and management of aid to be evenly distributed. It is necessary to set up good government policy on inputs and

outputs in order to increase cocoa seed productivity, decrease production cost and increase the price which simultaneously can improve its competitiveness in the research location.

**Keywords:** *Competitiveness, Cocoa, Policy Analysis Matrix*

**JEL Classification:** F10, F14, Q17

## **PENDAHULUAN**

Komoditi perkebunan merupakan salah satu komoditi andalan bagi pendapatan dan devisa Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh kontribusi subsektor perkebunan pada tahun 2013 yang mencapai USD 45,54 miliar atau setara dengan Rp.546,42 triliun (1 USD = Rp. 12.000,-) meliputi ekspor komoditas perkebunan sebesar USD 35,64 miliar, cukai hasil tembakau USD 8,63 miliar dan bea keluar (BK) CPO dan biji kakao sebesar USD 1,26 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 kontribusi subsektor perkebunan mengalami peningkatan sebesar 27,78% atau naik sebesar USD 9,90 miliar (Ditjenbun, 2015).

Selama tahun 2011 sampai tahun 2013, Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga setelah Pantai Gading dan Ghana. Saat ini Indonesia menjadi produsen bahan baku kakao kedua setelah Pantai Gading dengan menguasai 6% pasar dunia (ICCO, 2014). Indonesia sebenarnya berpotensi untuk menjadi produsen utama kakao dunia apabila berbagai

permasalahan utama yang dihadapi perkebunan kakao dapat diatasi dan agribisnis kakao dikembangkan serta dikelola secara baik.

Pengembangan kakao tidak terlepas dari perannya sebagai salah satu komoditas perkebunan yang menjadi fokus tujuan ekspor. Pengembangan kakao merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu tanaman ekspor dalam rangka mempertahankan pangsa pasar internasional yang sudah ada serta penetrasi pasar yang baru. Sesuai dengan tujuan pemerintah yang menjadikan kakao sebagai komoditas ekspor andalan, produksi kakao yang tinggi menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen dan eksportir biji kakao terbesar di dunia. Ekspor kakao yang tinggi dapat terjadi karena didorong dari sisi permintaan, yakni adanya pertumbuhan konsumsi dunia akan kakao selama sepuluh tahun terakhir, yaitu sebesar rata-rata 3% per tahun (Damayanti, 2012).

Jika konsumsi dunia meningkat, maka ekspor kakao Indonesia juga meningkat karena adanya peningkatan permintaan di negara importir. Permintaan konsumen akan produk kakao meningkat sejalan dengan peningkatan eksportnya (Gilbert & Varangis, 2003). Alasan peningkatan permintaan kakao antara lain banyaknya hasil studi yang menunjukkan dampak positif mengkonsumsi *dark chocolate* yang kaya antioksidan, yaitu menurunkan resiko penyakit jantung, kanker kolon, dan diabetes, dapat menurunkan tekanan darah, serta menunda penuaan (Camesécchia et al. 2002; Engler & Engler 2004; Fisher et al. 2004).

Produksi kakao yang relatif meningkat dari tahun ke tahun didorong oleh adanya peningkatan konsumsi kakao dunia. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk dunia dan pengaruh perbaikan ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Selama sepuluh tahun rata-rata ekspor kakao Indonesia sebesar USD 999.6 juta, sedangkan rata-rata impor yakni sepersepuluh nilai ekspor sebesar USD 105 juta. Pada tahun 2011 terjadi penurunan nilai ekspor kakao

Indonesia, demikian juga dengan tahun 2010 penurunan ekspor kakao cukup besar. Hal ini terjadi karena menurunnya permintaan negara-negara Eropa sebagai akibat krisis ekonomi di kawasan tersebut. Krisis tersebut juga berimbas pada permintaan negara-negara lainnya khususnya negara mitra dagang Eropa seperti China. Dengan menurunnya permintaan dari China, maka berarti menurun pula permintaan kakao dari Indonesia. Untuk tahun 2011 nilai ekspor kakao Malaysia lebih tinggi dibanding nilai ekspor kakao Indonesia. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya ekspor kakao Indonesia lebih tinggi dibanding ekspor kakao Malaysia. Hal tersebut terbukti dengan peningkatan nilai ekspor kakao Indonesia yang terus meningkat mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2010 dan nilai ekspor Indonesia tersebut masih mengungguli nilai ekspor Malaysia (Ragimun, 2012).

Kualitas biji kakao yang diekspor oleh Indonesia dikenal sangat rendah (berada di kelas 3 dan 4). Hal ini disebabkan pengelolaan produk kakao yang masih tradisional (85% biji kakao produksi nasional tidak difermentasi) sehingga kualitas kakao Indonesia menjadi rendah. Kualitas rendah

menyebabkan harga biji dan produk kakao Indonesia di pasar internasional dikenai diskon USD 200/ton atau 10% sampai 15% dari harga pasar. Selain itu, beban pajak ekspor kakao olahan (sebesar 30%) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beban pajak impor produk kakao (5%), kondisi tersebut telah menyebabkan jumlah pabrik olahan kakao Indonesia terus menyusut (Suryani & Zulfebriansyah, 2007).

Selain itu para pedagang (terutama *trader* asing) lebih senang mengekspor dalam bentuk biji kakao (non olahan). Berdasarkan fakta tersebut, komoditas-komoditas Indonesia yang berorientasi ekspor harus memiliki daya saing agar dapat diterima oleh konsumen dunia. Kakao merupakan salah satu komoditas Indonesia yang berorientasi ekspor sehingga akan menghadapi persaingan di pasar internasional. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian mengenai daya saing kakao Indonesia.

Pengusahaan kakao di Indonesia dilaksanakan oleh tiga pihak yaitu Perkebunan rakyat, Perkebunan Negara, dan Perkebunan Swasta. Perkebunan rakyat merupakan perkebunan penghasil kakao terbesar

di Indonesia dengan luas lahan mencapai 92% dari total keseluruhan luas areal perkebunan Indonesia, sedangkan sisanya merupakan perkebunan swasta dan perkebunan Negara. Perkebunan rakyat sebagai produsen kakao dengan luas lahan terbesar dibandingkan perkebunan Negara dan swasta tentu akan menghasilkan kakao dalam jumlah yang paling besar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kakao Indonesia yang dinilai berkualitas rendah di pasar dunia karena tidak terfermentasi secara sempurna (*unfermented*) berasal dari perkebunan rakyat (Aliyatillah & Kusnadi, 2011).

Mengingat kakao merupakan komoditas perkebunan Indonesia yang berorientasi ekspor, perdagangannya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah seperti tarif, kuota, subsidi, dan pajak. Kebijakan tersebut erat kaitannya dengan output dan input perusahaan komoditas kakao. Salah satu kebijakan pemerintah untuk komoditi kakao adalah kebijakan bea keluar atau pajak ekspor biji kakao. Tercatat penurunan secara signifikan oleh ekspor biji kakao Indonesia sebesar 48.4% pada bulan April 2010 (Rifin, 2013). Pajak ini ditetapkan

untuk setiap kakao yang dibeli oleh pabrik dalam negeri sedangkan untuk tujuan ekspor tidak dikenakan pajak. Kebijakan ini tentunya akan mengakibatkan produsen kakao dalam negeri lebih memilih untuk melakukan kegiatan ekspor. Dampak lain yang terjadi adalah industri pengolah kakao domestik kekurangan pasokan bahan baku kakao.

Kebijakan pemerintah yang ada juga akan mempengaruhi daya saing komoditas kakao di Sulawesi Tengah sebagai produsen terbesar biji kakao Indonesia. Kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap input dan output perusahaan komoditas kakao di Sulawesi Tengah. Kebijakan yang mengakibatkan biaya input menurun dan menambah nilai guna output akan meningkatkan daya saing komoditas kakao, sedangkan kebijakan yang mengakibatkan biaya input menjadi naik dan nilai guna output menurun akan menurunkan juga daya saing.

Selain itu, usaha pengembangan perkebunan kakao lebih terfokus pada perluasan areal tanaman, peningkatan produksi dan perbaikan kualitas biji kakao yang dihasilkan. Perkembangan areal tanam dan produksi kakao ini menarik banyak pihak untuk terlibat dalam proses pemasarannya. Petani

sebagai produsen kakao tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga, sehingga petani hanya sebagai *price taker*. Sementara pedagang bertindak sebagai penentu harga.

Setiap permasalahan yang ada pada agribisnis kakao akan mempengaruhi *supply* petani sebagai respon terhadap kebijakan dan dinamika pasar yang ada sehingga dapat dilihat kinerja industri kakao, ukuran kinerja dalam hal ini dapat dilihat melalui keuntungan finansial dan ekonomi usahatani serta daya saing agribisnis kakao di Sulawesi Tengah sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji daya saing komoditi kakao di Sulawesi Tengah dan melihat peran dari pemerintah dalam meningkatkan daya saing komoditi kakao.

## **METODE**

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah sentra produksi kakao di Sulawesi Tengah. Selanjutnya dipilih Kecamatan

Ampibabo dan Kecamatan Palolo karena kedua lokasi tersebut merupakan sentra kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April sampai Juni 2015. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan pemberian kuesioner dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa narasumber seperti petani, lembaga pemasaran, pedagang input pertanian, *stakeholder*, pakar ahli di bidang kakao. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi atau lembaga

yang terkait dengan penelitian antara lain data harga biji kakao dan informasi eksportir daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah, data produksi biji kakao dari Badan Pusat Statistik dan lembaga-lembaga terkait (*stakeholder*) dalam bidang komoditas kakao misalnya informasi lapangan yang didapatkan dari penyuluh pertanian, informasi harga saprodi yang didapatkan dari pemilik kios pertanian yang ada

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan sampel 80 responden yang merupakan petani kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi (Tabel 1).

**Tabel 1. Luas lahan dan produksi kakao berdasarkan kabupaten di Sulawesi Tengah, 2013**

No.	Kabupaten	Luas Lahan	Produksi(Ton)	Produktivitas
1.	Banggai Kepulauan	7 009	3 063	0.43
2.	Banggai	46 467	19 980	0.42
3.	Morowali	16 116	5 120	0.32
4.	Poso	40 689	34 532	0.85
5.	Donggala	30 394	22 546	0.74
6.	Toli-toli	21 263	9 869	0.46
7.	Buol	11 578	7 000	0.60
8.	Parigi Moutong	69 711	69 982	1.00
9.	Tojo Una-una	13 856	8 308	0.59
10.	Sigi	27 645	19 956	0.72
11.	Banggai Laut	1 071	627	0.58
12.	Morowali Utara	15 150	7 394	0.49
13.	Kota Palu	496	108	0.21

Sumber : BPS (2014)

Penentuan responden (petani contoh) ditentukan secara *purposive*. Jumlah data responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 petani biji kakao di masing-masing kabupaten sehingga total responden sebanyak 80 petani biji kakao. Data yang diperoleh meliputi data karakteristik responden, data input dan output usahatani kakao, informasi harga input dan output usahatani kakao, informasi sistem pemasaran dan kelembagaan petani.

Petani yang dipilih merupakan petani yang memiliki kebun kakao berumur minimal tujuh tahun karena tanaman kakao mulai berproduksi pada umur tujuh tahun. Penentuan responden terhadap lembaga pemasaran, pedagang input pertanian, *stakeholder*, pakar ahli di bidang kakao terkait penelitian ditentukan secara *purposive*. Metode ini digunakan dengan pertimbangan karena pihak tersebut dianggap paling mengetahui informasi yang diharapkan sehingga dapat membantu peneliti dalam memperoleh dan menggali informasi dari objek yang dibutuhkan. Untuk lembaga pemasaran terdiri dari dua pedagang desa di Kabupaten Parigi Moutong, tiga pedagang kecamatan di Kabupaten Parigi

Moutong, dua pedagang kecamatan di Kabupaten Sigi, dua pedagang besar di Kota Palu, dan dua pelaku eksportir.

Peneliti mengikuti jalur pemasaran dari petani untuk mengetahui harga output serta kerjasama yang terjalin. Untuk pedagang input pertanian, peneliti menggali informasi dari tiga pedagang input pertanian di Kabupaten Parigi Moutong dan satu pedagang input pertanian di Kabupaten Sigi, penentuan responden ini berdasarkan informasi dari petani mengenai pembelian input. Penentuan responden *stakeholder* dan pakar ahli bidang kakao, juga dilakukan secara *purposive* dengan mewawancarai ketua ASKINDO Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Perkebunan Sulawesi Tengah, Kepala PERTANI Sulawesi Tengah, Kepala Bea Cukai Sulawesi Tengah, dan beberapa pakar ahli kakao di Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menghimpun informasi mengenai kebijakan untuk komoditi kakao, jalur perdagangan pupuk, jalur perdagangan biji kakao dari pelabuhan Sulawesi Tengah, harga FOB kakao, dan harga CIF beberapa pupuk non-subsidi.

Penentuan jumlah sampel dan teknik pengambilan data dalam penelitian ini berdasarkan pada Pearson *et al.* (2005) bahwa data yang diambil untuk *Policy Analysis Matrix* (PAM) bisa dari contoh yang tidak terlalu besar, baik dari segi petani, pedagang, pelaku usaha, maupun pengolahan, karena data yang dimasukkan dalam PAM merupakan modus (*central tendency*), bukan parameter yang diestimasi melalui model ekonometrik dengan jumlah contoh yang valid secara statistik. Peneliti dirangsang untuk mengumpulkan lebih banyak informasi baik dari segi aspek maupun kedalaman, dibanding jumlah petani yang diwawancarai.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis daya saing kakao dan dampak kebijakan pemerintah yaitu analisis PAM.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa tahap. Tahap pertama

adalah penentuan input dan output usahatani kakao. Tahap kedua adalah pengidentifikasian input ke dalam komponen input *tradable* yaitu input yang diperdagangkan di pasar internasional baik di ekspor maupun di impor dan identifikasi input *non tradable* yaitu input yang dihasilkan di pasar domestik dan tidak diperdagangkan secara internasional. Tahap ketiga yaitu penentuan harga privat dan harga bayangan input serta output, kemudian tabulasi dan analisis indikator-indikator yang dihasilkan tabel PAM. Data yang diperoleh diolah menggunakan perangkat lunak *Microsoft Excel*.

Secara lengkap tabulasi matrix analisis kebijakan dapat dilihat pada Tabel 2. Asumsi yang digunakan dalam analisis PAM ini adalah :

1. Harga pasar adalah harga yang benar-benar diterima petani yang didalamnya terdapat kebijakan pemerintah (distorsi pasar).
2. Harga bayangan adalah harga pada kondisi pasar persaingan sempurna yang mewakili biaya imbalan sosial yang sesungguhnya. Pada komoditas *tradable*, harga bayangan adalah harga yang terjadi di pasar dunia/internasional.

3. Output bersifat *tradable* sedangkan input dapat dipisahkan berdasarkan faktor asing (*tradable*) dan faktor domestik (*non tradable*).
4. Eksternalitas dianggap sama dengan nol.

**Tabel 2. Tabulasi Matrix Analisis Kebijakan**

Uraian	Penerimaan Output	Biaya Input		Keuntungan
		Tradable	Non Tradable	
Harga Privat	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Dampak Kebijakan	I	J	K	L

Sumber: Monke and Pearson, (1989)

Keterangan:

1. Keuntungan Privat (D) =  $A - (B + C)$
2. Keuntungan Sosial (H) =  $E - (F + G)$
3. Transfer Output (I) =  $A - E$
4. Transfer Input *Tradable* (J) =  $B - F$
5. Transfer Input *Non Tradable* (K) =  $C - G$
6. Transfer Bersih (L) =  $I - (K + J)$
7. Rasio Biaya Privat (PCR) =  $C/(A - B)$
8. Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (DRC) =  $G/(E - F)$
9. Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) =  $A/E$
10. Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) =  $B/F$
11. Koefisien Keuntungan (PC) =  $D/H$

Adapun penjelasan atas matriks diatas adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Input dan Output Usahatani Kakao  
Input yang digunakan adalah lahan, bibit, pupuk, pestisida alami dan kimia, tenaga kerja, dan bahan bakar. Output yang dihasilkan adalah biji kakao.
2. Metode Alokasi Komponen Biaya Asing dan Domestik  
Menurut Monke & Pearson (1989), terdapat dua pendekatan mengalokasikan biaya domestik dan asing

yaitu pendekatan langsung (*direct approach*) dan pendekatan total (*total approach*). Pendekatan langsung mengasumsikan seluruh biaya input yang dapat diperdagangkan (*tradable*) baik impor maupun produksi dalam negeri dinilai sebagai komponen biaya asing dan dapat dipergunakan apabila tambahan permintaan input *tradable* tersebut dapat dipenuhi dari perdagangan internasional. Dengan kata lain, input *non tradable* yang sumbernya dari

pasar domestik ditetapkan sebagai komponen domestik dan input asing yang dipergunakan dalam proses produksi barang *non tradable* tetap dihitung sebagai komponen biaya asing. Sementara pada pendekatan total, setiap biaya input *tradable* dibagi ke dalam komponen biaya domestik dan asing, dan penambahan input *tradable* dapat dipenuhi dari produksi domestik jika input tersebut memiliki kemungkinan untuk diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian, pendekatan total lebih tepat digunakan apabila produsen lokal dilindungi, sehingga tambahan input didatangkan dari produsen lokal atau pasar domestik. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan secara tunai maupun yang diperhitungkan untuk menghasilkan komoditas akhir yang siap dipasarkan atau dikonsumsi. Biaya domestik dapat didefinisikan sebagai nilai input yang digunakan dalam suatu proses produksi. Penentuan alokasi biaya produksi ke dalam komponen asing (*tradable*) dan domestik (*non tradable*) didasarkan atas jenis input, penentuan biaya

input *tradable* dan *non tradable* dalam biaya total input.

### 3. Penentuan Harga Bayangan

Harga bayangan adalah sebagian harga yang terjadi dalam perekonomian pada keadaan persaingan sempurna dan kondisinya dalam keadaan keseimbangan (Gittinger, 1986). Kondisi biaya imbalan sama dengan harga pasar sulit ditemukan, maka untuk memperoleh nilai yang mendekati biaya imbalan atau harga sosial perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga pasar yang berlaku.

Dalam penelitian ini untuk menentukan harga sosial atau harga bayangan komoditas yang diperdagangkan didekati dengan harga batas (*border price*). Untuk komoditas yang selama ini diekspor digunakan harga FOB (*free on board*) dan untuk komoditas yang diimpor digunakan harga CIF (*cost insurance freight*). Untuk harga FOB, karena merupakan harga batas di pelabuhan ekspor perlu dikurangi biaya transport dan *handling* dari pedagang besar ke pelabuhan. Sementara untuk harga CIF karena merupakan harga batas di pelabuhan impor, maka perlu ditambah biaya

transport dan *handling* dari pelabuhan ke lokasi penelitian.

Pada penelitian ini, output yang dihasilkan adalah biji kakao. Harga bayangan output ditentukan berdasarkan harga perbatasan (*border price*) atau harga FOB di pelabuhan terdekat. Selanjutnya karena kakao merupakan komoditas ekspor maka dikurangi biaya tataniaga (angkut). Untuk input dari usahatani kakao yaitu lahan, sarana produksi tenaga kerja, dan bahan bakar. Harga bayangan lahan adalah nilai sewa/pajak lahan yang berlaku di daerah setempat. Harga bayangan pupuk urea mengacu pada harga FOB karena urea sudah mulai di ekspor sedangkan untuk pupuk SP-36 dan KCL menggunakan harga CIF karena pupuk tersebut merupakan pupuk impor. Harga bayangan (sosial) peralatan seperti sekop, cangkul, parang, dan peralatan lain menggunakan harga aktual. Penentuan harga bayangan tenaga kerja sebesar 80% dari tingkat upah yang berlaku (Suryana, 1980). Hal ini didasari pada asumsi bahwa terdapat 20% *opportunity cost* dari para petani tersebut untuk memperoleh pendapatan/pekerjaan di luar usahatani

kakao misalnya menjadi pembantu tukang bangunan, pemanjat kelapa, beternak sapi kambing dan lain-lain.

Menurut Gittinger (1986), bahwa penentuan harga bayangan nilai tukar mata uang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$SER = \frac{OER}{SCF_t} \dots\dots\dots(1)$$

dimana:

SER: Nilai Tukar Bayangan (Rp/USD)

OER: Nilai Tukar Resmi (Rp/USD)

SCF<sub>t</sub>: Faktor konversi Standar

Nilai faktor konversi standar yang merupakan rasio dari nilai impor dan ekspor ditambah pajaknya dapat ditentukan sebagai berikut :

$$SCF_t = \frac{X_t + M_t}{(X_t - T_{xt}) + (M_t + T_{mt})} \dots\dots(2)$$

Dimana:

SCF<sub>t</sub> : Faktor konversi standar untuk tahun ke-t

X<sub>t</sub> : Nilai ekspor Indonesia untuk tahun ke-t (Rp)

M<sub>t</sub> : Nilai impor Indonesia untuk tahun ke-t (Rp)

T<sub>xt</sub> : Penerimaan pemerintah dari pajak ekspor untuk tahun ke-t (Rp)

T<sub>mt</sub> : Penerimaan pemerintah dari pajak impor untuk tahun ke-t (Rp)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Policy Analysis Matrix* (PAM) pada Usahatani Komoditas Kakao

Berdasarkan hasil perhitungan *Policy Analysis Matrix* (PAM) diperoleh hasil seperti yang diberikan pada Tabel 3. Berdasarkan pada Tabel 3 terlihat bahwa sistem komoditas kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi menguntungkan baik secara finansial maupun ekonomi. Keuntungan privat dan keuntungan sosial di Kabupaten Parigi Moutong

dan Kabupaten Sigi menunjukkan nilai positif. Namun, petani akan lebih menguntungkan lagi jika tidak terdapat intervensi dari pemerintah karena harga privat atau harga yang berlaku di lapangan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan harga sosial atau harga bayangan yaitu harga yang seharusnya berlaku di lapangan jika tidak ada campur tangan pemerintah. Hal tersebut terlihat dari nilai efek divergensi yang negatif efek divergensi merupakan selisih dari harga privat dan harga sosial.

**Tabel 3. *Policy Analysis Matrix* (PAM) pada Usahatani Komoditas Kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi (Rp/Ha)**

Uraian	Penerimaan Output	Biaya		Keuntungan
		Input Tradable	Faktor Domestik	
<b>Kabupaten Parigi Moutong</b>				
Harga Privat	21 917 250	690 796	12 516 666	8 709 788
Harga Sosial	34 292 019	923 156	12 929 751	20 439 112
Efek Divergensi	-12 374 769	-232 360	-413 085	-11 729 324
<b>Kabupaten Sigi</b>				
Harga Privat	36 483 618	415 269	14 307 696	21 760 653
Harga Sosial	46 104 525	560 189	14 565 331	30 979 005
Efek Divergensi	-9 620 907	-144 920	-257 635	-9 218 352

Sumber: Data Primer (2015), diolah

Secara umum, keuntungan privat usahatani kakao di Kabupaten Sigi yaitu Rp.21.760.653 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan privat di Kabupaten Parigi Moutong yaitu Rp.8.709.788. Terdapat selisih

Rp.13.050.865 antara keuntungan privat dari Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong. Tingginya keuntungan privat di Kabupaten Sigi dipengaruhi oleh tingginya penerimaan privat usahatani kakao yang dihasilkan

petani. Meskipun total biaya privat yang dikeluarkan untuk usahatani kakao di Kabupaten Sigi juga tertinggi dibanding Kabupaten Parigi Moutong, penerimaan privat yang diperoleh jauh lebih besar. Sementara itu, keuntungan privat usahatani kakao di Kabupaten Parigi Moutong tergolong kecil, hal ini dikarenakan penerimaan privat usahatani kakao di Kabupaten Parigi Moutong relatif kecil sedangkan biaya yang dikeluarkan hampir seimbang dengan besarnya penerimaan. Salah satu penyebab rendahnya penerimaan privat usahatani kakao di Kabupaten Parigi Moutong adalah rendahnya produktivitas kakao yang dapat dicapai. Selain produktivitas, harga jual biji kakao ditingkat petani juga mempengaruhi penerimaan dan bervariasi antar daerah. Rata-rata harga yang berlaku di Kabupaten Sigi relatif tinggi yaitu sebesar Rp 29.734/kilogram dan di Kabupaten Parigi Moutong relatif rendah yaitu Rp23.875/kilogram. Meskipun harga jual di Kabupaten Parigi Moutong rendah, namun produktivitas yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sigi. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas dari biji kakao yang dihasilkan masih

tergolong rendah dan sistem ijon yang masih berlaku antara petani dan pedagang desa.

Keuntungan privat usahatani kakao dilokasi penelitian yang bernilai positif tersebut menunjukkan bahwa adanya campur tangan pemerintah pada usahatani kakao di Indonesia memberikan insentif positif terhadap keuntungan usahatani kakao dilokasi penelitian. Dengan adanya intervensi pemerintah, petani kakao dilokasi penelitian dapat menerima keuntungan usahatani positif. Namun apabila dilihat nilai keuntungannya, keuntungan privat usahatani kakao dilokasi penelitian relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan sosial tanpa intervensi dari pemerintah. Petani kakao harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk usahatani kakao terutama untuk pupuk dan tenaga kerja. Sementara itu produktivitas kakao yang dicapai petani masih dibawah potensial produksi. Kondisi harga yang berfluktuasi juga menyebabkan penerimaan petani menjadi tidak menentu. Meskipun kebijakan pemerintah pada saat ini mampu memberikan insentif positif pada usahatani kakao, kebijakan-kebijakan tersebut masih perlu untuk dikaji

kembali supaya dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap keuntungan usahatani kakao di Indonesia.

Keuntungan sosial adalah keuntungan yang dihitung pada tingkat harga sosial atau harga bayangan yaitu tingkat harga dimana tidak ada kebijakan pemerintah dan distorsi pasar. Harga sosial mencerminkan harga sebenarnya dari input maupun output yang digunakan. Usahatani kakao di Indonesia masih tidak terlepas dari peran kebijakan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam usahatani kakao ini diantaranya adanya subsidi pupuk, subsidi bahan bakar minyak, subsidi bunga pinjaman, dan kebijakan bea keluar. Dalam perhitungan keuntungan sosial, seluruh bentuk kebijakan pemerintah tersebut dihilangkan dari komponen harga. Nilai keuntungan yang diperoleh nantinya akan menggambarkan keuntungan yang akan diterima petani apabila tidak adanya kebijakan pemerintah sama sekali.

Berdasarkan perhitungan keuntungan sosial, usahatani kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi mengalami keuntungan (Tabel 3). Rata-rata

keuntungan yang terbesar diterima oleh petani di Kabupaten Parigi Moutong yaitu sebesar Rp.11.729.324/ha, sedangkan keuntungan terkecil diterima oleh petani di Kabupaten Sigi yaitu sebesar Rp.9.218.352/ha. Nilai keuntungan ini menunjukkan bahwa dengan tidak adanya kebijakan pemerintah maka petani kakao di lokasi penelitian akan mengalami keuntungan yang cukup besar. Keuntungan yang diterima petani tersebut disebabkan oleh tingginya penerimaan sosial usahatani kakao yang diterima petani. Penerimaan sosial yang diterima petani jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya sosial yang dikeluarkan. Besarnya penerimaan sosial usahatani kakao ini disebabkan karena harga bayangan kakao jauh lebih tinggi daripada harga aktualnya.

Harga bayangan kakao yang diperoleh dari harga *Free On Board* (FOB) kakao adalah USD3.230/kilogram. Harga FOB kakao tersebut kemudian dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar bayangan untuk tahun 2015 yaitu sebesar Rp11.993.85/USD. Setelah dikonversi ke dalam rupiah kemudian ditambahkan dengan biaya tataniaga

dan penanganan selama di pelabuhan maka diperoleh harga bayangan kakao di tingkat petani. Hasil perhitungan menunjukkan harga bayangan kakao di Kabupaten Parigi Moutong Rp.37.355.14/kilogram dan di Kabupaten Sigi Rp 37.575/kilogram. Harga bayangan kakao jauh lebih tinggi daripada harga aktual yang diterima petani. Sebagai pembanding, rata-rata harga aktual kakao di Kabupaten Parigi Moutong adalah Rp 23.875/kilogram dan di Kabupaten Sigi Rp 29.734/kilogram. Harga bayangan kakao yang lebih tinggi dari harga aktualnya secara tidak langsung menunjukkan bahwa harga kakao luar negeri jauh lebih tinggi daripada harga kakao dalam negeri. Pemerintah memperketat peraturan ekspor untuk kakao melalui kebijakan pajak ekspor atau lebih dikenal dengan kebijakan bea keluar.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Menurut Peraturan tersebut, kebijakan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta peningkatan daya saing industri pengolahan dalam negeri. Dengan

kata lain peraturan ini juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan biji kakao di dalam negeri dan meningkatkan ekspor produk olahan kakao yang bernilai tambah. Namun, pada kenyataannya industri cokelat dalam negeri belum mampu menampung produksi biji kakao dalam negeri.

Rifin (2012) mengungkapkan bahwa kebijakan menetapkan bea keluar bagi biji kakao yang akan diekspor yang dikeluarkan pemerintah sudah berdampak pada perubahan komposisi ekspor kakao Indonesia yang semula ditahun 2009 komposisi biji kakao sebesar 75.30%, telah berkurang di tahun 2011 menjadi 51.76%. Namun pertumbuhan ekspor kakao Indonesia periode 2009-2011 jauh dibawah pertumbuhan ekspor dunia bahkan mengalami pertumbuhan yang negatif. Produk kakao Indonesia kurang mengikuti kebutuhan pasar. Negara yang memiliki komposisi produk yang positif merupakan negara yang memiliki kontribusi cukup tinggi pada ekspor kakao dalam bentuk produk-produk hilir (pasta kakao, kakao *butter*, bubuk kakao dan cokelat). Oleh karena itu ekspor produk biji kakao Indonesia harus dialihkan ke produk bernilai

tambah seperti biji kakao terfermentasi, dan selanjutnya mengkhususkan pada ekspor produk setengah jadi seperti pasta kakao dan kakao butter. Meskipun Indonesia merupakan produsen biji kakao utama di dunia, posisi daya saing produk kakao Indonesia masih sangat lemah bila dibandingkan Pantai Gading dan Ghana. Berbeda dengan penelitian sebelumnya Widyastutik & Arianti (2013) menyatakan bahwa peluang ekspor biji kakao Indonesia masih terbuka lebar ke Jerman dengan memperbaiki mutu dan standar ekspor biji kakao Indonesia.

Apabila dibandingkan antara keuntungan privat dengan keuntungan sosial yang diterima oleh petani, keuntungan privat usahatani kakao lebih rendah daripada keuntungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani kakao dilokasi penelitian lebih menguntungkan pada saat tidak

terdapat kebijakan pemerintah daripada adanya kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah pada input kakao secara simultan masih memberikan insentif bagi petani kakao, namun kebijakan pemerintah pada output masih belum berpengaruh nyata sehingga keuntungan privat yang diperoleh lebih kecil dari keuntungan sosialnya. Besarnya dampak dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari nilai divergensi keuntungan yang diperoleh bernilai negatif.

#### **Analisis Keunggulan Kompetitif**

Analisis keunggulan kompetitif komoditas kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi dapat diukur dengan indikator *Private Cost Ratio* (PCR) dan Keuntungan Privat (KP). Data mengenai besarnya PCR dan KP sistem komoditas kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Rasio Biaya Privat dan Keuntungan Privat Usahatani Komoditas Kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi**

No.	Lokasi	PCR	Keuntungan Privat (Rp/Ha)
1	Kabupaten Parigi Moutong	0.589	8 709 788
2	Kabupaten Sigi	0.396	21 760 653

Sumber : Data Primer (2015), diolah

Kondisi keunggulan kompetitif komoditas kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi dapat didekati dengan melihat alokasi sumberdaya untuk mencapai efisiensi secara finansial dalam usahatani kakao. Efisiensi secara finansial diukur dengan menggunakan indikator PCR. PCR merupakan rasio antara biaya faktor domestik dengan nilai tambah output dari biaya input *tradable* pada harga privat atau harga yang didalamnya terdapat kebijakan pemerintah. Nilai PCR menunjukkan kemampuan suatu sistem komoditas dalam membiayai faktor domestiknya pada harga privat. Semakin kecil nilai PCR maka semakin besar tingkat keunggulan kompetitif dari perusahaan suatu komoditas.

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai PCR yang diperoleh pada sistem komoditas kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi kurang dari satu. Nilai tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan nilai tambah output sebesar satu satuan pada harga privat di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi, diperlukan tambahan biaya faktor domestik kurang dari satu satuan. Berdasarkan interpretasi tersebut, alokasi sumberdaya dalam sistem

komoditas kakao di kedua lokasi tersebut sudah mencapai efisiensi secara finansial sehingga memiliki keunggulan kompetitif.

Nilai PCR yang cukup tinggi di kedua lokasi penelitian, yakni 0.589 (Kabupaten Parigi Moutong) dan 0.396 (Kabupaten Sigi) mengindikasikan bahwa sistem komoditas kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi memiliki kemampuan terbatas dalam membiayai faktor domestiknya. Jika nilai PCR di Kabupaten Parigi Moutong (0.589) dan Kabupaten Sigi (0.396) dibandingkan dengan nilai PCR pada komoditas kakao di PTPN VIII Kebun Cikumpai Afedeling Rajamandala Bandung (0.92) dalam penelitian Aliyatillah (2011), menunjukkan bahwa komoditas kakao di Sulawesi Tengah memiliki keunggulan kompetitif lebih tinggi dibandingkan PTPN VIII Kebun Cikumpai Afedeling Rajamandala Bandung.

Berikutnya, jika nilai PCR tersebut dibandingkan dengan komoditas kakao di PT. Perkebunan Durjo, Kabupaten Jember yang merupakan salah satu perkebunan swasta terbesar di Kabupaten Jember dengan nilai PCR 0.79 dalam penelitian Haryono (2011),

menunjukkan bahwa komoditas kakao pada perusahaan ini relatif kurang unggul secara kompetitif. Tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai PCR yang diperoleh dari sistem komoditas kakao di Kabupaten Sigi (0.396) relatif lebih besar dibandingkan Kabupaten Parigi Moutong (0.589). Nilai tersebut mengindikasikan bahwa besarnya faktor domestik pada harga privat yang diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah kakao sebesar satu satuan di Kabupaten Sigi relatif lebih kecil (0.396 satuan) dibandingkan di Kabupaten Parigi Moutong (0.589 satuan). Berdasarkan interpretasi tersebut, alokasi sumberdaya di Kabupaten Sigi relatif lebih efisien secara finansial dibandingkan dengan di Kabupaten Parigi Moutong. Hal ini mengindikasikan bahwa komoditas kakao di Kabupaten Sigi lebih memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan di Kabupaten Parigi Moutong.

Kondisi yang sama juga terlihat dari besarnya keuntungan privat yang diperoleh dari sistem komoditas kakao di Kabupaten Parigi Moutong (Rp 8.709.788 per hektar) yang relatif lebih kecil dibandingkan di Kabupaten Sigi (Rp.21.760.653/hektar). Keuntungan privat merupakan selisih antara penerimaan dengan seluruh biaya

yang dikeluarkan pada sistem komoditas kakao per hektar pada harga pasar (privat), yakni harga yang didalamnya terdapat kebijakan pemerintah seperti subsidi dan pajak. Tingginya keuntungan privat yang diperoleh pada sistem komoditas kakao di Kabupaten Sigi terjadi karena intensifikasi usahatani yang telah dilakukan mampu meningkatkan produksi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Parigi Moutong.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah menyebabkan peningkatan pada jumlah produksi dan penggunaan input. Peningkatan penerimaan yang lebih besar dari peningkatan biaya yang terjadi menyebabkan keuntungan privat yang diperoleh semakin besar. Kondisi ini berdampak pada peningkatan keunggulan kompetitif komoditas kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. Keunggulan kompetitif tersebut bisa lebih ditingkatkan lagi dengan mengeksport olahan biji kakao. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Hasibuan *et al.* (2012) mengenai daya saing perdagangan biji kakao dan produk kakao olahan Indonesia di pasar internasional. Hasil penelitian

Hasibuan *et al.* (2012) menunjukkan bahwa biji kakao, kakao pasta, kakao *butter* dan kakao bubuk tanpa tambahan memiliki daya saing yang tinggi karena berada pada posisi pasar *risingstar*. Sementara, kakao bubuk dengan tambahan dan kelompok bahan makanan yang mengandung coklat masuk pada posisi pasar *lost opportunity* dimana terjadi kehilangan pangsa pasar produk tersebut di pasar dunia.

### Analisis Keunggulan Komparatif

Analisis keunggulan komparatif komoditas kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi diukur dengan indikator *Domestic Resource Cost* (DRC) dan Keuntungan Sosial (KS). Tabel 5 menyajikan besarnya nilai DRC dan SP dari sistem komoditas kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi.

**Tabel 5. Rasio Biaya Sumberdaya Domestik dan Keuntungan Sosial Usahatani Komoditas Kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Sigi**

No.	Lokasi	DRC	Keuntungan Sosial (Rp/Ha)
1	Kabupaten Parigi Moutong	0.387	20 439 112
2	Kabupaten Sigi	0.319	30 979 005

Sumber : Data Primer (2015), diolah

Nilai DRC merupakan rasio antara biaya faktor domestik dengan selisih antara penerimaan dengan biaya input *tradable* pada harga bayangan (sosial) atau harga yang didalamnya tidak terdapat kebijakan pemerintah. Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai DRC yang diperoleh dari masing-masing lokasi penelitian lebih kecil dari satu. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa alokasi sumberdaya dalam sistem komoditas kakao di kedua lokasi tersebut sudah mencapai efisiensi secara ekonomi

sehingga memiliki keunggulan komparatif.

Jika nilai DRC pada komoditas kakao di Kabupaten Parigi Moutong (0.387) dan Kabupaten Sigi (0.319) dibandingkan dengan nilai DRC pada komoditas kakao di PTPN VIII Kebun Cikumpai Afedeling Rajamandala Bandung (0,95) dalam penelitian Aliyatillah (2011), menunjukkan bahwa komoditas kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi memiliki keunggulan komparatif lebih tinggi dibandingkan PTPN VIII Kebun

Cikumpai Afedeling Rajamandala Bandung. Jika nilai tersebut dibandingkan dengan komoditas kakao di PT. Perkebunan Durjo, Kabupaten Jember (0.61) dalam penelitian Haryono (2011) menunjukkan bahwa komoditas ini sama-sama unggul secara komparatif.

Tabel 5 memperlihatkan bahwa nilai DRC yang diperoleh dari sistem komoditas kakao di Kabupaten Sigi (0.319) relatif lebih kecil dibandingkan Kabupaten Parigi Moutong (0.387). Nilai tersebut mengindikasikan bahwa besarnya faktor domestik atau penggunaan komponen yang diproduksi dalam negeri pada harga sosial yang diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah kakao sebesar satu satuan di Kabupaten Sigi (0.319 satuan) relatif lebih kecil dibandingkan Kabupaten Parigi Moutong (0.387 satuan). Kondisi ini mengindikasikan bahwa alokasi sumber daya dalam sistem komoditas kakao di Kabupaten Sigi relatif lebih efisien secara ekonomi dibandingkan Kabupaten Parigi Moutong. Oleh sebab itu, keunggulan komparatif komoditas kakao di Kabupaten Sigi relatif lebih rendah dibandingkan di Kabupaten Parigi Moutong.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pada usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah mampu meningkatkan keunggulan kompetitif komoditas kakao di Provinsi tersebut. Namun, adanya peningkatan penggunaan input *tradable* yang mengandung komponen impor pada usahatani yang semakin intensif menyebabkan keunggulan komparatif komoditas kakao di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan. Oleh sebab itu, intensifikasi usahatani kakao dengan penggunaan input *tradable* yang mengandung komponen impor yang semakin rendah dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing komoditas kakao dalam menghadapi era perdagangan bebas. Dalam perkembangannya, komoditas kakao di Indonesia tidak terlepas dari berbagai bentuk kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan input. Kebijakan pemerintah yang diberlakukan menyebabkan besarnya biaya produksi yang dihitung pada harga privat akan berbeda dari harga sosialnya. Berdasarkan hal tersebut, dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing komoditas kakao penting dikaji.

Dampak kebijakan pemerintah dianalisis dengan pengamatan pada tiga aspek, diantaranya :

1. Dampak Kebijakan terhadap Output Indikator dampak kebijakan pemerintah terhadap output dapat dilihat dengan menggunakan nilai TO (*Transfer Output*) dan NPCO (*Nominal Protection Coefficient on Output*) (Pearson, 2005). Nilai TO yang negatif dan nilai NPCO yang kurang dari satu menunjukkan bahwa terdapat implisit pajak yang menyebabkan petani atau konsumen di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi menerima harga kakao lebih rendah 16.4% dan 8.7% dari harga yang seharusnya. Hal ini menimbulkan terjadinya transfer (insentif) dari produsen kepada konsumen. Pada kenyataannya, tidak ada kebijakan output yang diberlakukan terhadap komoditas kakao. Namun, salah satu hal yang mendorong rendahnya harga kakao di tingkat petani adalah kebijakan *automatic detention* yang ditetapkan oleh negara pengimpor kakao seperti Amerika Serikat. Kebijakan ini berupa pemotongan harga kakao karena kualitas biji kakao yang

dihasilkan oleh produsen kakao di Indonesia rendah.

Berdasarkan penelitian Damayanti (2012) ekspor kakao didorong dari sisi permintaan, yakni adanya pertumbuhan konsumsi dunia akan kakao selama sepuluh tahun terakhir, yaitu sebesar rata-rata 3% per tahun. Keadaan tersebut menjadi peluang yang besar bagi Indonesia sebagai produsen biji kakao terbesar ketiga didunia. Hambatan ekspor saat ini yang banyak dikeluhkan para pelaku kakao adalah diterapkannya Bea Keluar. Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) menyetujui tarif bea keluar ekspor biji kakao bila harga 2.000-2.750 dollar AS per ton dikenai pajak 5%. Untuk harga 2.750-3.500 dollar AS per ton, dikenai pajak 10%, sedangkan harga diatas 3.500 dollar AS per ton maka bea keluarnya 15%. Harga ekspor ini disesuaikan dengan fluktuasi tarif internasional dari bursa berjangka di New York (Syadullah, 2012).

2. Dampak Kebijakan terhadap Input Besarnya dampak kebijakan pemerintah terhadap input produksi kakao ditunjukkan oleh nilai Transfer Input (TI), Koefisien

Proteksi Input Nominal (NPCI), dan Transfer Faktor (TF). Nilai TI merupakan selisih antara biaya input *tradable* pada harga privat dengan biaya input *tradable* pada harga sosial (bayangan). Adapun NPCI merupakan rasio antara biaya input *tradable* yang dihitung berdasarkan harga privat dengan biaya input *tradable* yang dihitung berdasarkan harga bayangan (sosial). Nilai TI yang negatif dan NPCI yang kurang dari satu menunjukkan bahwa terdapat subsidi terhadap input *tradable* sehingga petani kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi menerima harga input *tradable* lebih rendah 84% dan 72.2% dari harga yang seharusnya (harga sosial). Hal ini menimbulkan transfer dari pemerintah kepada produsen kakao. Beberapa bentuk kebijakan tersebut antara lain berupa bantuan pemerintah seperti bibit tanaman kakao dan pupuk anorganik dalam rangka program intensifikasi, serta kebijakan subsidi dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk anorganik seperti pupuk Urea dan SP-36. Meskipun harga privat input domestik di Kabupaten Sigi relatif

lebih murah dibandingkan di Kabupaten Parigi Moutong, namun hal ini tidak menyebabkan biaya input domestik privat di Kabupaten Sigi (Rp 14.307.696 per hektar) lebih murah dibandingkan di Kabupaten Parigi Moutong (Rp 12.516.666 per hektar). Kondisi ini terjadi karena usahatani kakao yang lebih intensif di Kabupaten Sigi relatif lebih banyak menggunakan sumberdaya modal dan tenaga kerja dibandingkan di Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu, panjangnya jalur pemasaran di Kabupaten Parigi Moutong menyebabkan ketidakefisienan kinerja pemasaran. Hal tersebut serupa dengan penelitian Baktiawan (2008) yang menunjukkan bahwa tidak adanya keterpaduan harga pasar jangka panjang antara pasar tingkat petani dan tingkat eksportir (pedagang besar). Ketidakefisienan ini diakibatkan oleh panjangnya rantai pemasaran yang ada dan adanya senjang informasi harga yang terjadi.

### 3. Dampak Kebijakan terhadap Input-Output

Analisis kebijakan pemerintah terhadap input-output adalah analisis gabungan antara kebijakan

input dan kebijakan output. Dampak kebijakan gabungan tersebut dapat dilihat dari indikator Koefisien Proteksi Efektif (EPC), Transfer Bersih (TB), Koefisien Keuntungan (PC) dan Rasio Subsidi Produsen

(SRP). Tabel 6 menyajikan data mengenai besarnya indikator EPC, TB, PC dan SRP pada sistem komoditas kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi.

**Tabel 6. Nilai EPC, TB, PC, dan SRP pada Usahatani Komoditas Kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi**

No	Lokasi	EPC	TB	PC	SRP
1	Kabupaten Parigi Moutong	0.839	-41 344 598.11	0.105	-0.232
2	Kabupaten Sigi	0.922	-1 758 632.88	0.941	-0.008

Sumber : Data Primer (2015), diolah

Nilai EPC merupakan rasio antara selisih penerimaan dan biaya input *tradable* pada harga privat (aktual) dengan selisih penerimaan dan biaya input *tradable* pada harga sosial (bayangan). Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai EPC yang diperoleh dari usahatani kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi adalah kurang dari satu. Nilai ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah terhadap input-output yang berlaku tidak melindungi petani kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi secara efektif. Dengan kata lain, petani kakao di lokasi penelitian tidak mendapatkan fasilitas proteksi dari pemerintah sehingga harga kakao yang berlaku di Kabupaten Parigi Moutong dan

Kabupaten Sigi (Rp 23.875 per kilogram dan Rp 29.734 per kilogram) berada di bawah harga efisiennya (Rp 37.355 per kilogram dan Rp 37.575 per kilogram).

Indikator lain yang menunjukkan tidak adanya proteksi dari pemerintah terhadap petani kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi adalah Transfer bersih (TB). TB adalah selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima petani dengan keuntungan bersih sosial (dengan asumsi pasar bersaing sempurna). Nilai transfer bersih TB dari usahatani kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi bernilai negatif.

Nilai koefisien keuntungan (PC) pada Tabel 6 juga menunjukkan tidak

adanya proteksi dari pemerintah terhadap petani kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi. PC adalah rasio antara keuntungan privat (aktual) dengan keuntungan sosial. Nilai PC yang diperoleh dari usahatani kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi menunjukkan kurang dari satu. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah terhadap input-output telah menyebabkan keuntungan privat dari usahatani kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi lebih rendah dari keuntungan yang seharusnya diterima seandainya tidak ada kebijakan (keuntungan sosial). Dengan kata lain, kebijakan pemerintah terhadap input-output yang berlaku saat ini tidak memberikan dampak positif terhadap usahatani kakao di kedua lokasi tersebut.

Berikutnya, rasio subsidi bagi produsen (SRP) merupakan rasio antara TB dengan penerimaan berdasarkan harga sosial (bayangan). Berdasarkan Tabel 5, nilai SRP yang diperoleh dari usahatani kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi bernilai negatif. Nilai ini menunjukkan bahwa adanya transfer akibat kebijakan pemerintah

yang berlaku selama ini menyebabkan pendapatan petani kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi menurun sehingga menjadi lebih rendah tanpa adanya kebijakan.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah terhadap input-output yang berlaku selama ini belum secara efektif melindungi petani kakao di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi. Hal ini terlihat dari relatif rendahnya harga kakao yang diterima petani dibandingkan harga sosialnya, penurunan surplus produsen, keuntungan dan pendapatan sehingga menjadi lebih rendah dibandingkan tanpa adanya kebijakan. Berdasarkan hasil analisis, ketidakefektifan kebijakan tersebut lebih dirasakan oleh petani kakao di Kabupaten Parigi Moutong dibandingkan petani kakao di Kabupaten Sigi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intensifikasi usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah mampu meminimalisir dampak ketidakefektifan kebijakan input-output pada sistem komoditas kakao di Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Analisis Sensitivitas Akibat Adanya Berbagai Perubahan**

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika sebesar 6%,

mengindikasikan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar sebesar 6%, tidak mempengaruhi keunggulan kompetitif komoditas kakao melainkan menyebabkan peningkatan pada keunggulan komparatifnya. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aliyatillah (2011), bahwa depresiasi mata uang rupiah hanya mempengaruhi daya saing kakao dari keunggulan komparatifnya saja. Hal serupa juga dinyatakan oleh Ratana *et.al* (2012) bahwa pergerakan nilai tukar tidak memiliki dampak pada volume ekspor Indonesia. Namun, Ginting (2013) menyatakan bahwa nilai tukar dalam jangka panjang dan jangka pendek memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia. Peningkatan harga kakao domestik sebesar 19%, menyebabkan usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah berpengaruh terhadap semakin besarnya peningkatan keunggulan kompetitif komoditas kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. Penurunan harga kakao domestik sebesar 19%, menyebabkan intensifikasi usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah berpengaruh terhadap semakin besarnya penurunan keunggulan

kompetitif komoditas kakao di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kebijakan pemerintah berupa penetapan PE yang semula ditujukan untuk melindungi industri pengolahan kakao dalam negeri ini ternyata menurunkan keunggulan kompetitif (daya saing) komoditas kakao. Kondisi ini berpengaruh terhadap semakin menurunnya keuntungan yang diperoleh petani. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri *et all* (2013) yang menunjukkan bahwa pajak ekspor memiliki hubungan negatif terhadap volume ekspor dan harga domestik. Oleh sebab itu, kebijakan PE biji kakao untuk mempercepat pertumbuhan industri hilir perkebunan sebaiknya tidak dijadikan prioritas utama. Kenaikan harga pupuk urea sebesar 33% dan pupuk SP-36 sebesar 29%, menyebabkan intensifikasi usahatani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah berpengaruh terhadap semakin besarnya penurunan keunggulan kompetitif komoditas kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa harga pupuk bersubsidi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing kakao di Provinsi Sulawesi Tengah.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Berdasarkan hasil analisis PAM diketahui bahwa usahatani komoditi kakao di Sulawesi Tengah memiliki daya saing, namun tidak menguntungkan secara ekonomi diduga karena Sulawesi Tengah menghasilkan biji kakao yang tidak difermentasi sehingga petani menerima harga yang rendah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dampak kebijakan pemerintah terhadap output diketahui bahwa pemerintah masih belum memberikan proteksi terhadap harga biji kakao dalam negeri melalui harga referensi biji kakao sehingga harga biji kakao dalam negeri khususnya didaerah penelian masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan harga biji kakao ditingkat pasar internasional. Sementara untuk kebijakan pemerintah terhadap input, pemerintah telah memberikan subsidi kepada petani namun perlu memperbaiki mekanisme penyaluran dan pengelolaan bantuan agar subsidi tersebut tersalurkan secara merata. Dengan demikian, kebijakan pemerintah masih diperlukan baik terhadap input maupun output untuk meningkatkan produktivitas biji kakao,

meningkatkan harga jual biji kakao, dan menurunkan biaya produksi yang secara simultan dapat meningkatkan daya saing biji kakao di lokasi penelitian. Untuk mencapai hal tersebut, maka petani dan stakeholder perlu bersinergi sehingga dapat menghasilkan biji kakao yang berkualitas dan mendapatkan harga yang tinggi. Hal ini membawa kebermanfaatan bukan cuma ditingkat petani tetapi juga ditingkat daerah.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Amzul Rifin, SP, MA dan Dr. Ir. Burhanuddin, M.Si atas komentar dan masukannya dalam perbaikan penulisan penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aliyatillah dan Kusnadi. (2011). Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Kakao PTPN VIII Kebun Cikumpay Afdeling Rajamandala Bandung. *Forum Agribisnis* Volume 1 (2) : 151-166.
- Baktiawan, J. (2008). Analisis pengembangan perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Lampung Timur [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2014). Statistik Perkebunan Indonesia : Badan Pusat Statistik.
- Carnesécchia, S. (2002). Flavanols and Procyanidins of Cocoa and Chocolate Inhibit Growth and

- Polyamine Biosynthesis of Human Colonic Cancer Cells. *Cancer Letters*, 175, 147-155. doi:0.1016/S0304-3835(01)00731-5
- Damayanti, D. (2012). Industri Kakao. Office of Chief Economist. *Mandiri*. 11;1-4.
- Ditjenbun. (2015). Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kakao 2013-2015. Direktorat Jenderal Perkebunan
- Engler, MB, MM. Engler.(2004). The Vasculoprotective Effects of Flavonoid-Rich Cocoa and Chocolate. *Nutrition Research*, 24:695-706.
- Fisher N, M. Hughes, N. Hollenberg. (2004). Cocoa Rich in Flavanols Reverses Endothelial Dysfunction of Human Aging Via No. *American Journal of Hypertension*, 17(5):A69
- Gilbert, C., and P. Varangis. (2003). Globalization and International Commodity Trade with Specific Reference to the West African Cocoa Producers. *National Bureau of Economic Research*.
- Ginting, AM. (2013). Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor Indonesia. *Buletin Ilmiah Perdagangan*. Vol. 7 (1).
- Gittinger, J.P. (1986). Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian. Terjemahan Edisi Kedua. Jakarta (ID) UI-Press dan John Hopkins
- Haryono, D. (2011). Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Produksi Kakao di Jawa Timur. *J-Sep* Vol. 5 No.2 Juli 2011.
- Hasibuan, AM, R. Nurmalina, A. Wahyudi.(2012). Analisis kinerja dan daya saing perdagangan biji kakao dan produk kakao olahan Indonesia di pasar internasional. *Buletin Ristri* 3(1): 57-70.
- International Cocoa Organization (ICCO), (2014). *Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics*, [Internet]. [diunduh 2014 Oktober 02]
- Monke AE, Pearson SR. (1989). Policy Analysis Matrix for Agricultural Development. New York (US): Cornell University Press
- Pearson S, G. Carl G, S. Bahri. (2005). *Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia*. Jakarta (ID): Yayasan Obor.
- Putri, A., Osmet, R. Khairati. (2013). Analisis Pengaruh Pajak Ekspor (Bea Keluar) Terhadap Volume Ekspor, Ketersediaan Domestik dan Harga Domestik Biji Kakao Indonesia. [tesis]. Padang (ID): Universitas Andalas
- Ragimun. (2012). Analisis Daya Saing Komoditas Kakao Indonesia. *Jurnal Pembangunan Manusia* 6 (2).
- Ratana, DS., NA.Achsani NA, T. Andati. (2012). Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Ekspor Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*.9(3):154-162
- Rifin, A. (2013). Competitiveness of Indonesia's Cocoa Beans Export in the World Market. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 4 (5).
- Rifin, A. (2012). Competitiveness of Indonesia's Cocoa Beans Export in the World Market. *International Journal of Trade, Economics and Finance*. 4(5): 279-281.
- Suryani, D., & Zulfabriansyah, (2007). Komoditas Kakao : Potret dan Peluang Pembiayaan. *Economic Review* : 210 . Desember 2007.
- Syadullah, M. (2012). Dampak Kebijakan Bea Keluar Terhadap Ekspor dan Industri Pengolahan Kakao. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 6 No. 1.
- Widyastutik, & R.K. Arianti . (2013). Strategi Kebijakan Mutu dan Standar

Produk Ekspor dalam Meningkatkan  
Daya Saing (Studi Kasus Produk  
Ekspor Biji Kakao). *Jurnal*

*Manajemen & Agribisnis*.10(2):98-  
108